

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berada di tengah tiga lempeng tektonik yang paling aktif di dunia—Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik—membuat Indonesia menjadi negara yang sangat menarik. Tiap lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda dan mengalami proses saling bertumbukan dan menjauh satu sama lain. Interaksi antara lempeng-lempeng ini menghasilkan konsekuensi tertentu untuk Indonesia, yaitu posisi Indonesia yang berada di kawasan yang rentan terhadap bencana. Bukan hanya satu jenis bencana, peristiwa ini menyebabkan Indonesia dikelilingi oleh beragam jenis bencana. Bencana dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak wajar dan parah yang berdampak besar pada masyarakat, memengaruhi individu, aset, serta ekosistem, dan mengatasi efek yang melampaui kapasitas manusia dengan sumber daya yang ada.

Sebagai contoh Banjir adalah salah satu jenis bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia, khususnya di Jakarta. Fenomena banjir di Jakarta sudah menjadi hal yang biasa. Kota Jakarta termasuk salah satu daerah yang paling parah terpengaruh oleh banjir. Hampir setiap tahun, selama musim hujan, banjir sering terjadi. Jakarta mengalami kondisi banjir yang paling ekstrem pada tahun 2002, 2007, dan 2013. Pada akhir tahun 2020, Jakarta kembali dilanda banjir besar. Banjir ini mengakibatkan sekitar 30 orang meninggal dan lebih dari 62.453 individu harus meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di tempat aman sementara, Tidak hanya di Jakarta, wilayah lain seperti Provinsi Jawa Tengah juga

rentan terhadap banjir. Provinsi ini sebenarnya lebih sering mengalami bencana banjir jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa (Harjoko et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanganan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam atau aktivitas manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, serta masalah sosial yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan yang segera. Jumlah kejadian bencana alam dan jenisnya berdasarkan provinsi, 2024.

**Tabel 1. 1 Jumlah Bencana Alam Menurut Provinsi**

**Jumlah Bencana Alam Menurut Provinsi dan Jenis Bencana Alam (Kejadian), 2024**

Provinsi	Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi	Jumlah Bencana Alam - Tsunami	Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Bencana Alam - Letusan Gunung Api	Jumlah Bencana Alam - Tanah Longsor	Jumlah Bencana Alam - Banjir	Jumlah Bencana Alam - Kekeringan	Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Bencana Alam - Cuaca Ekstrem	Jumlah Bencana Alam - Gelombang Pasang/Abraisi
Aceh					2	48.0	1.0	35.0	17.0	
Sumatera Utara					10	101.0	1.0	25.0	26.0	1.0
Sumatera Barat					8	52.0	1.0	3.0	2.0	1.0
Riau					1	54.0		7.0	2.0	2.0
Jambi						15.0		4.0	2.0	
Sumatera Selatan					1	43.0		13.0	8.0	
Bengkulu	1.0				1	8.0		1.0	1.0	
Lampung						27.0	1.0	7.0	25.0	
Kepulauan Bangka Belitung						2.0		20.0	3.0	
Kepulauan Riau					1	4.0		22.0	13.0	
DKI Jakarta						10.0			3.0	
Jawa Barat	6.0				50	79.0	10.0	11.0	101.0	1.0
Jawa Tengah	2.0				19	71.0	8.0	38.0	75.0	
DI Yogyakarta	1.0						3.0		10.0	
Jawa Timur	2.0				11	86.0	12.0	104.0	83.0	
Banten	1.0				3	34.0	1.0	2.0	5.0	
Bali	2.0				5	4.0	4.0	4.0	2.0	
Nusa Tenggara Barat	1.0				1	36.0	4.0	3.0	11.0	1.0

Nusa Tenggara Timur			3.0	4	6.0		4.0	7.0	1.0
Kalimantan Barat					41.0		7.0	2.0	
Kalimantan Tengah					38.0		9.0		
Kalimantan Selatan	1.0			1	15.0		6.0	4.0	
Kalimantan Timur					13.0		5.0	3.0	
Kalimantan Utara				2	5.0		3.0		
Sulawesi Utara			1.0	1	17.0			3.0	1.0
Sulawesi Tengah	3.0			1	71.0		1.0	2.0	
Sulawesi Selatan				7	77.0	7.0	3.0	29.0	1.0
Sulawesi Tenggara					17.0			3.0	
Gorontalo				2	32.0	1.0		1.0	
Sulawesi Barat				2	16.0			3.0	
Maluku				1	17.0			7.0	1.0
Maluku Utara	1.0		2.0	1	25.0			2.0	1.0
Papua Barat				1	10.0				1.0
Papua Barat Daya					4.0				
Papua				...	6.0				1.0
Papua Selatan					2.0				1.0
Papua Tengah					5.0				
Papua Pegunungan				3					
Indonesia	19.0		5.0	139	1.0	54.0	337.0	455.0	14.0

*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/National Disaster Management Authority*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, terdapat variasi besar dalam jenis serta jumlah bencana alam yang melanda berbagai provinsi di Indonesia selama tahun tersebut. Banjir muncul sebagai bencana paling umum, mempengaruhi hampir seluruh kawasan di Indonesia, dengan angka tertinggi yang tercatat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 101 kejadian, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 90 kejadian dan DKI Jakarta yang mengalami 75 kejadian. Situasi ini menunjukkan bahwa area dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan curah hujan yang signifikan sangat rentan terhadap kejadian banjir. Selain itu, cuaca ekstrem menempati posisi kedua dalam hal frekuensi, khususnya di wilayah-wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur yang masing-masing melaporkan lebih dari 50 kejadian. Ini menggambarkan dampak

nyata dari perubahan iklim global yang mulai dirasakan secara lokal, terutama melalui peningkatan dalam intensitas serta frekuensi bencana cuaca ekstrem. Bencana kekeringan, meskipun jarang terjadi, tetap memberikan dampak yang serius di area-area rentan, seperti Nusa Tenggara Timur dan sebagian daerah Sumatera.

Lebih jauh, jenis bencana yang berhubungan dengan faktor geologi, seperti gempa bumi, letusan vulkanik, dan tsunami, terbilang cukup jarang dilaporkan, namun tetap memiliki makna yang penting dalam hal risiko. Contohnya, meskipun gempa bumi dan tsunami hanya terjadi di sejumlah lokasi, keduanya tetap merupakan ancaman signifikan bagi keselamatan warga dan infrastruktur, terutama di area rawan seperti Sumatera Barat dan Maluku. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi isu utama di daerah seperti Aceh dan Kalimantan Barat, yang mengalami lebih dari 30 insiden dalam setahun. Pola kejadian ini menunjukkan bahwa masalah kebencanaan di Indonesia sangat kompleks, melibatkan perpaduan antara bencana hidrometeorologi dan geologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis data guna merancang strategi mitigasi yang sesuai. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas manajemen bencana di tingkat lokal, serta memperluas program pendidikan tentang kebencanaan kepada masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan.

Salah satu wilayah di Pulau Jawa yang paling mudah terpapar bencana adalah Jawa Tengah. Provinsi ini memiliki banyak gunung berapi dan terletak pada jalur seismik yang aktif. Selain itu, ada peningkatan peluang terjadinya banjir dan tanah longsor. Jawa Tengah termasuk provinsi yang paling sering mengalami bencana di Indonesia. Menurut informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2023, Jawa Tengah mencatatkan 580 kejadian bencana secara keseluruhan. Rinciannya meliputi 92 kejadian banjir, 156 kejadian cuaca ekstrem, 122 kejadian tanah longsor, 176 kejadian kebakaran hutan dan lahan, 31 kejadian kekeringan, serta 3 kejadian erupsi gunung berapi (BNPB, 2023). Provinsi Jawa Tengah terdiri dari total 35 kabupaten atau kota, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Boyolali, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, sering menghadapi ancaman bencana yang signifikan, terutama terkait dengan kemungkinan letusan Gunung Merapi. Gunung Merapi berada di batas antara dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Merapi adalah gunung berapi yang sangat aktif dan berpotensi berbahaya, sehingga keberadaannya meningkatkan risiko mengingat banyaknya penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Merapi (Monalia & Noorrawati 2024).

Oleh karena itu terbentuklah kebijakan yang dibuat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana (Destana) pertama kali diperkenalkan dan dibangun di Indonesia pada tahun 2012. Program ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun

2012, yang berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan desa atau wilayah yang resilient terhadap bencana. Sejak saat itu, inisiatif Destana telah terus berkembang dan diterapkan di banyak daerah di Indonesia guna memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, tujuan pendirian Destana adalah sebagai berikut: (1) Melindungi masyarakat di wilayah yang berisiko tinggi dari dampak negatif bencana; (2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana; (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pelestarian kearifan lokal mengenai cara mengurangi risiko bencana; (4) Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dukungan sumber daya dan teknis untuk pengurangan risiko bencana; (5) Meningkatkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, termasuk pemerintah daerah dan organisasi internasional yang berkolaborasi untuk menekan risiko bencana.

Inisiatif Desa Tangguh Bencana memperoleh dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012, desa atau kelurahan memiliki kapasitas untuk mengenali potensi bahaya di sekitarnya dan mampu mengelola sumber daya masyarakat untuk mengurangi keraguan serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko bencana. Desa yang siap menghadapi bencana seharusnya memiliki kemandirian dalam beradaptasi, menghadapi potensi ancaman, dan dengan cepat pulih pasca bencana. Konsep desa tangguh bencana adalah manifestasi dari tanggung jawab

pemerintah untuk menjaga keselamatan warganya dari bahaya. Desa Tangguh Bencana terbagi dalam tiga kategori: Destana Utama, Destana Madya, dan Destana Pratama. Destana Utama, yang sudah memenuhi sejumlah kriteria tertentu, menempati level tertinggi.

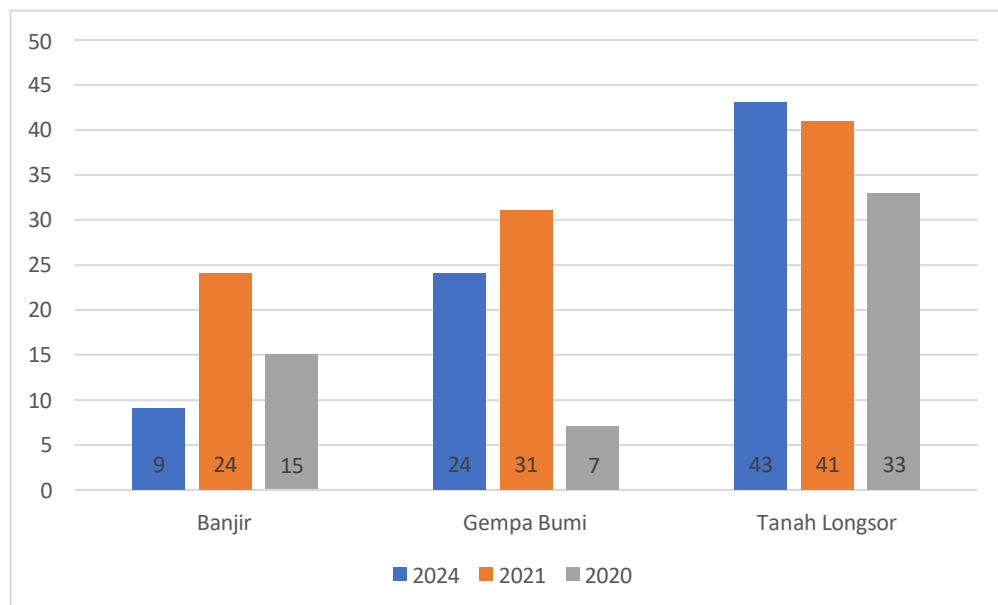
Pengembangan DESTANA adalah salah satu inisiatif yang berfokus pada mitigasi bencana melalui penguatan peran masyarakat. Perencanaan pembangunan menggunakan kemampuan ini untuk investasi dalam pencegahan, persiapan, pengurangan risiko bencana, dan Peningkatan kemampuan pemulihan setelah terjadinya bencana. Dalam program DESTANA, masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan penelitian, analisis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengurangan risiko bencana di daerah mereka sendiri, terutama dengan memanfaatkan sumber daya setempat untuk menjamin keberlanjutan (Nugroho et al., 2023).

Masyarakat perlu berperan aktif untuk memastikan desa mereka siap menghadapi bencana. Hal ini mencakup pemahaman tentang potensi bahaya bencana yang dapat terjadi, menyiapkan rencana darurat, serta memastikan akses yang aman terhadap bantuan dan layanan kesehatan yang diperlukan saat bencana melanda. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari dampak bencana terhadap kesehatan mereka dan cara-cara mereka dapat bersiap dan pulih setelah terjadinya bencana.



data dari berbagai sumber seperti milik BPS Wonogiri, BPBD Wonogiri, dan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani. Perbedaan data ini memang menunjukkan hal yang sangat signifikan, tentu saja data tersebut perlu divalidasi sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Namun untuk mendorong gambaran yang ada dapat disajikan beberapa data sebagai berikut.

**Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Data Kebencanaan di Wonogiri Tahun 2020, 2021, dan 2024**



*Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri (2025)*

Grafik tersebut menunjukkan angka kebencanaan di Kabupaten Wonogiri yang fluktuatif dan cenderung tinggi dari tahun ke tahun. Menurut BPS, fenomena bencana paling sering terjadi adalah tanah longsor sebanyak 43 catatan pada tahun 2024, adapun bencana yang paling minim terjadi adalah gempa bumi dengan tujuh (7) catatan pada tahun 2020.

Berbeda dari data BPS, kutipan BPBD Wonogiri dalam Praditia (2025)

menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024 telah tercatat 134 peristiwa tanah longsor di Wonogiri, dan wilayah yang paling sering mengalaminya adalah Kecamatan Tirtomoyo sebanyak 52 kejadian pada tahun 2024. Meskipun berbeda kondisi ini dapat dinyatakan tergolong tinggi.

Data kebencanaan tersebut kemudian dilengkapi dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 yang mengalami penurunan signifikan pada poin 86,79 dari tahun 2023. IRBI yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri cenderung turun tetapi dengan kapasitas daerah untuk mengelola bencana pada poin sedang.

Kondisi yang sedemikian rupa, Kabupaten Wonogiri termasuk wilayah yang melaksanakan Program Destana di Wonogiri yang disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memiliki kesempatan untuk membangun Desa Tangguh Bencana (Destana), yang merupakan Program Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program ini sejalan dengan visi "Membangun ketahanan negara dalam merespons bencana".

Sebanyak 294 Desa di Wonogiri telah mengimplementasikan program ini pada tahun 2025 dan jumlah ini diklaim sebagai jumlah Destana terbanyak se-Indonesia (Media Indonesia, 2024). Implementasi ini dilakukan dengan baik melalui fasilitas kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, BPBD, dan BNPB. Salah satu implementasi dapat dilihat di seluruh desa yang terletak di Kecamatan Tirtomoyo, dimana seluruh desa sudah difasilitasi program ini dengan baik (Ajie, 2022). Selain Ajie, Setiawan (2023) juga menjelaskan bahwa program

mitigasi yang digadang oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui BPBD adalah Destana, untuk melatih masyarakat desa yang sigap menghadapi bencana.

Kabupaten Wonogiri dipilih sebagai tempat penelitian karena daerah ini menunjukkan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah lokasi lain di Provinsi Jawa Tengah. Ciri geografis Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar terdiri dari perbukitan serta curah hujan yang relatif tinggi menjadikan daerah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana, khususnya longsor tanah, banjir, dan angin kencang. Selain itu, Kabupaten Wonogiri juga merupakan salah satu wilayah yang secara aktif menjalankan Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri, sampai tahun 2025 terdaftar sekitar 294 desa telah melaksanakan program Destana. Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk menghadapi bencana melalui pendekatan berbasis komunitas.

Program Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah inisiatif yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam usaha pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Dalam praktiknya, program ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terfokus pada evaluasi kebijakan di tingkat pusat, melainkan pada penilaian implementasi program Destana di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Wonogiri.

Namun demikian, pelaksanaan program Destana di berbagai wilayah tidak

selalu berjalan optimal. Beberapa studi mengindikasikan bahwa penerapan program Destana masih menghadapi beragam tantangan, seperti kekurangan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, serta partisipasi masyarakat yang belum merata dalam kegiatan terkait bencana. Penelitian yang dilakukan oleh Arisandri (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana masih menghadapi berbagai rintangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia serta keberlanjutan aktivitas mitigasi bencana di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program Destana telah diterapkan di berbagai kawasan, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Evaluasi program adalah sebuah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program tersebut. Dengan evaluasi program, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program serta mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapan kebijakan ke depan. Dalam konteks program Destana, evaluasi menjadi krusial karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali ancaman bencana, melakukan mitigasi, serta memperbaiki kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana secara mandiri.

Dalam implementasinya, keberhasilan suatu desa untuk dinyatakan sebagai Desa Tangguh Bencana dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan

dalam pedoman pengembangan Destana. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, suatu desa dapat dianggap berhasil menjadi Desa Tangguh Bencana apabila memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman bencana, memiliki sistem perencanaan pengurangan risiko bencana, memiliki kelembagaan kebencanaan di tingkat desa, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan setelah bencana. Sebaliknya, suatu desa belum sepenuhnya dianggap berhasil apabila pelaksanaan kegiatan kebencanaan masih terbatas, kelembagaan kebencanaan belum berfungsi secara optimal, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu diperbaiki.

Desa Sendang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan program Destana di Kabupaten Wonogiri serta memiliki karakteristik wilayah yang rentan terhadap bencana. Selain itu, desa ini telah memiliki beberapa indikator awal sebagai desa tangguh bencana, seperti keberadaan relawan kebencanaan dan kegiatan mitigasi bencana. Dengan demikian, Desa Sendang dianggap representatif dalam menggambarkan pelaksanaan program Destana di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan penelitian terkait evaluasi Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Wonogiri guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program Destana serta mengidentifikasi berbagai faktor

yang menghambat implementasinya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pengurangan risiko bencana di tingkat desa.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Destana di Kabupaten Wonogiri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Program Destana di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025, termasuk sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuannya.
2. Untuk mengkaji berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasi Program Destana di tingkat desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Mampu membangun kesadaran Masyarakat akan pentingnya program destana sebagai bentuk partisipasi serta peran penting dalam program destana dan memberikan pembekalan kepada Masyarakat mengenai ilmu kebencanaan dalam menghadapi bencana, serta tambahan bagaimana mengurangi resiko bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program destana, serta untuk melatih kemampuan dalam

melakukan penelitian. Penelitian ini khususnya dapat membantu penulis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### a. Bagi Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan kebijakan.

##### b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang program destana, serta bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian di masa depan.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini melihat penelitian sebelumnya untuk membandingkannya dengan penelitian penulis sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dan referensi bagi penulis. Berikut adalah daftar penelitian sebelumnya..

Yang pertama, *Journal of Politik and Government Studies* yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016*” yang ditulis oleh Miftakhul Munir (2017). Penelitian ini berfokus pada Desa Tangguh Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan teori Thomas Dye yaitu “evaluasi kebijakan merupakan suatu tujuan, investigasi, sistematis dan empiris terhadap kebijakan dan program publik yang tepat sasaran dari tujuannya”. Metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui

wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program desa tangguh bencana di Kabupaten Kendal tahun 2016 masih dalam taraf pencapaian tujuan. Perbedaan dari penulis yaitu pada teori yang digunakan. Teori penulis adalah teori Evaluasi Program Suchman dalam Arikunto sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Teori Thomas Dye Evaluasi Kebijakan.

Yang kedua, Skripsi yang berjudul “*Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Untuk Penanggulangan Banjir*” yang ditulis oleh Della Rizki Prameisa (2018). Penelitian ini berfokus pada Evaluasi, Desa Tangguh Bencana, Banjir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan fokusnya dibatasi pada dua hal. Pertama, proses pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana berdasarkan keenam komponen yang ditetapkan. Kedua, evaluasi terhadap Program Desa Tangguh Bencana yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana belum mampu mencapai tujuannya dengan cara yang efektif, selain itu kurangnya kapasitas dari tim relawan sehingga program tersebut belum mampu dikatakan tangguh karena masih adanya kekurangan pada program desa tangguh bencana tersebut. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis pada lokasi penelitian.

Yang ketiga, Tesis yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman*” yang ditulis oleh Resti Fajria (2023). Penelitian ini berfokus pada Evaluasi, Desa Tangguh Bencana, Pelaksanaan Program. Penelitian ini menggunakan teori Althaus, Bridgman dan Davis dengan variabel *input*, *output*, proses, dan *outcome* dari sebuah program. Metode yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program Desa Tangguh bencana di Kabupaten Padang Pariaman dengan mengambil tiga Nagari yaitu Nagari Katapiang, Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Tapakih sudah terlaksana namun dalam tindak lanjut pelaksanaan oleh Tujuan BPBD Padang Pariaman untuk menjadikan nagari yang mandiri dan tangguh terhadap risiko bencana belum terpenuhi karena kondisi nagari belum optimal. diferensiasi antara penelitian sebelumnya dan karya penulis mengenai teori yang digunakan.

Yang keempat, Jurnal Riset Planologi yang berjudul "*Evaluasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sebagai Desa Tangguh Bencana di Desa Lebih, Gianyar, Bali*" yang ditulis oleh I Putu Wahyu Wedanta Pucangan dan Wahyudi Arimbawa (2020). Penelitian ini berfokus pada kebencanaan, evaluasi, pengembangan, kapasitas masyarakat, desa tangguh bencana. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan dukungan data kuantitatif. Tingkat ketangguhan Desa Lebih terhadap bencana tsunami dan abrasi mencapai 2,6, yang menempatkannya dalam kategori "Desa Tangguh Bencana Madya". Tingkat keberhasilan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana mencapai 2,9, yang menempatkannya dalam kategori "Desa Tangguh Bencana Madya", "Berhasil". Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis lokasi yang diambil oleh peneliti.

Yang kelima, Jurnal Humanitas yang berjudul "*Desa Tangguh Bencana: Evaluasi Peran dan Keberhasilan Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Lombok Tengah Tahun 2018*" yang ditulis oleh Lalu Budiman, Lalu Mulkan Thariq Akbar,

Lalu Malik Fajar Rasyid. Penelitian ini berfokus pada desa tangguh bencana, gempa bumi, mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Mengungkapkan peran (role) adalah aspek dinamis dari posisi atau status seseorang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa yang tahan terhadap bencana dapat menangani bencana alam dengan cukup efektif seperti gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis pada Lokasi penelitian.

Yang keenam, Scientific Journal of Reflection yang berjudul "*Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Provinsi Riau*" yang tulis oleh Ratih Setyo Rini, Puji Yuniarti, dan Wiwin Wianti (2021). Penelitian ini berfokus pada Monitoring, Evaluation, Disaster Resilient Village. Metode yang digunakan Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan Destana. Teori evaluasi digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di provinsi Riau sebagian besar mencapai tujuannya, tetapi ada beberapa masalah yang menghalangi pencapaian tujuan. Perbedaan dengan penulis ada pada metode yang digunakan serta lokasi penelitian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada teori

yang digunakan. Teori terdahulu yang ditulis oleh Miftakhul Munir (2017) menggunakan Teori Thomas Dye yaitu “evaluasi kebijakan merupakan suatu tujuan, investigasi, sistematis dan empiris terhadap kebijakan dan program publik yang tepat sasaran dari tujuannya” lalu teori terdahulu yang ditulis oleh Resti Fajria (2023) menggunakan Althaus, Bridgman dan Davis dengan variabel input, output, proses dan outcome dari sebuah program. Sedangkan penulis menggunakan teori Daniel L. Stufflebeam Teori CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Lokasi penelitian. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Miftakhul Munir (2017) berada di Lokasi Kendal lalu penelitian yang ditulis oleh Resti Fajria (2023) berada di Lokasi Padang Pariaman.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Teori Evaluasi Program**

#### **a. Pengertian Evaluasi**

Menurut Scriven (Tayibnapi, 2008:21), dua jenis fungsi evaluasi yang paling penting adalah evaluasi formatif. Fungsi formatif mencakup penilaian terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, seperti program, produk, dan lain sebagainya, serta penilaian untuk keperluan pertanggungjawaban, penjelasan, seleksi, atau tindak lanjut. Untuk membantu orang menghitung dan meningkatkan kualitas program atau kegiatan, ada proses yang disebut evaluasi, seperti yang dijelaskan oleh Mutrofin (2010:33-36). Ini termasuk empat dimensi utama penilaian, yaitu:

#### **1) Evaluasi melibatkan pertimbangan nilai**

Evaluasi memerlukan perhatian terhadap nilai dari suatu program.

Ini merupakan tujuan dan karakteristik yang dapat membedakan dari semua

pertimbangan lainnya. Kecukupan fundamental yang terdiri dari bukti, kepercayaan, dan pemahaman yang dianggap layak menentukan sejauh mana keputusan itu akurat.

2) Evaluasi berbeda dengan riset

Riset dan evaluasi adalah dua jenis penyelidikan sistematis. Keduanya memiliki teknik, metode, dan prosedur penyelidikan. Perbedaan yang paling signifikan antara keduanya adalah tujuan penyelidikan yang akan dilayani. Ini termasuk topik penyelidikan, bagaimana hasil dapat digeneralisasi, dan peran penilaian.

3) Beberapa kontribusi analisis terhadap upaya pengambilan Keputusan

Pengukuran terhadap program atau aktivitas dilakukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan, sehingga mereka mampu memilih antara beragam opsi kebijakan yang ada. Analisis ini mencakup lebih dari sekadar para perencana dan administrator, tetapi juga kelompok lain yang terpengaruh oleh keberadaan suatu program.

4) Evaluasi adalah kegiatan praktis yang mendorong menuju tindakan

Dalam hal ini, evaluasi berfungsi sebagai alasan yang memotivasi tindakan, bukan hanya sebagai cara memperoleh pengetahuan baru. Evaluasi ini menghasilkan beragam kesimpulan tentang program..

Evaluasi dilakukan dengan mengukur berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan program, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil dijalankan. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses untuk menganalisis, menilai, dan memahami hal-hal yang

dievaluasi agar mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil dilaksanakan..

b. Evaluasi CIPP

Dilakukan dengan mengukur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah tindakan untuk menganalisis, menilai, dan mengenai hal-hal yang akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Berdasarkan pendapat Stufflebeam (1983), model evaluasi yang terdiri dari Evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk merupakan empat tahap evaluasi yang diperkenalkan oleh CIPP. Model ini berlandaskan pada keyakinan bahwa tujuan utama evaluasi adalah meningkatkan kinerja suatu program. Secara umum, saat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap suatu program, ada banyak model yang dapat dipilih. Untuk menilai berbagai aspek dari program kewaspadaan bencana di Desa Tangguh Bencana, penulis penelitian ini akan mengadopsi model CIPP, yaitu Context, Input, Process, dan Product, yang diciptakan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Model ini merupakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif, dirancang untuk memfasilitasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap berbagai elemen seperti program, proyek, sumber daya manusia, produk, institusi, dan sistem. Sering kali disebut sebagai model evaluasi, model CIPP memiliki format evaluasi yang lengkap di setiap tahapnya. Model ini memberikan penekanan dan tujuan khusus untuk setiap komponennya, namun semua elemen tersebut saling berhubungan. Berikut adalah penjelasan mengenai empat komponen dari model CIPP:

1) *Context evaluation* (evaluasi konteks)

Tujuan evaluasi konteks adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai objek evaluasi, seperti program, institusi, lembaga, populasi, atau individu, dan kemudian memberikan rekomendasi atau rekomendasi untuk perbaikan objek tersebut. Evaluasi konteks juga dapat disebut sebagai konsep program. Tujuan dan kebutuhan pembinaan diperiksa dalam analisis ini. Tujuan dari ini adalah untuk mengevaluasi apakah tujuan serta sasaran yang ada bertepatan dengan kebutuhan organisasi yang sedang dinilai, serta untuk menilai keakuratan, keaktualan, dan legitimasi dari penilaian kebutuhan tersebut. Evaluasi konteks, menurut Arikunto & Cepi (2010: 46), merupakan usaha untuk menggambarkan dan menerangkan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi, sampel yang dilayani, dan misi proyek.

2) *Input evaluation* (evaluasi masukan)

Menurut Djudju (2008: 55) evaluasi input menilai pendekatan alternatif, kegiatan rencana, anggaran, dan kelayakan biaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan program. Ini memberikan informasi untuk mengetahui cara menggunakan sumber daya agar mencapai tujuan program. Ini terkait dengan kemudahan, kesesuaian, biaya, hasil yang diharapkan, serta pilihan yang dianggap lebih baik.

3) *Process evaluation* (evaluasi proses)

Evaluasi proses sebagai bentuk pelaksanaan keputusan dan pengecekan apakah program tersebut sesuai. Menurut Arikunto dan Cepi

(2012: 47), evaluasi proses menilai sejauh mana kegiatan program telah berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Menurut Djudju (2008:55), evaluasi proses memberikan umpan balik mengenai sejauh mana program berjalan dengan efisien, termasuk dampak sistem dan seberapa baik program itu dilaksanakan. Memelihara dokumentasi prosedur yang dilakukan, membuat keputusan tentang implementasi program, dan menemukan atau memperkirakan kesalahan dalam desain dan pelaksanaan kegiatan program dibantu oleh evaluasi ini.

#### 4) *Product evaluation* (evaluasi hasil)

Evaluasi produk adalah bagian dari serangkaian evaluasi program. Menurut Arikunto & Cepi (2010: 47), evaluasi produk atau hasil evaluasi berfokus pada perubahan pada input mentah. Namun, menurut Judju (2008:89), evaluasi produk melibatkan mengevaluasi sejauh mana tujuan program tersebut telah tercapai. Dalam evaluasi, tujuan diatur dan diawasi, serta informasi yang diperoleh digunakan untuk memutuskan apakah program tersebut perlu diteruskan atau diubah.

Terdapat empat jenis evaluasi yang biasa digunakan. Mereka adalah pendekatan eksperimental, pendekatan berorientasi tujuan yang memperhatikan keputusan, pendekatan berorientasi pengguna, serta pendekatan responsif yang menekankan pada hasil yang dicapai dan penilaian. Dua jenis evaluasi adalah formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan sepanjang berjalannya program untuk meningkatkan kualitasnya. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir program agar konsumen tahu manfaat atau kegunaan dari program tersebut.

Dua jenis evaluasi adalah evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam institusi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh orang yang bekerja di luar institusi. Penilaian implementasi untuk setiap tahapan evaluasi program dikategorikan menjadi rendah, moderat, atau tinggi. Dengan fokus pada pemegang keputusan, model CIPP adalah model evaluasi yang paling kompleks untuk digunakan dalam penelitian ini. Ini karena, berdasarkan penjelasan evaluasi sebelumnya, model ini dapat menyampaikan semua data yang ingin dikumpulkan peneliti, baik dari konteks penelitian maupun dari hasil akhir penelitian.

#### 1.6.2 Implementasi Kebijakan

1. Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
  - a. Interaksi, yaitu keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensyaratkan agar pelaksana memahami tugas yang harus dijalankan, di mana tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga dapat mengurangi distorsi dalam pelaksanaan.
  - b. Sumber daya, meskipun substansi kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengeksekusi, maka pelaksanaan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi pelaksana dan sumber daya finansial.
  - c. Disposisi, adalah sifat dan karakter yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, integritas, dan sikap demokratis. Jika pelaksana memiliki

disposisi yang positif, maka pelaksana tersebut dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik menurut harapan pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi kurang efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek dari struktur organisasi meliputi Prosedur Operasional Standard (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung mengurangi efektivitas pengawasan dan menciptakan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan kegiatan organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Joko Purnomo, 2020), sumber-sumber yang relevan mencakup staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Struktur Birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu Prosedur Operasional Standard (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam operasional organisasi yang kompleks dan tersebar. Sementara itu, fragmentasi muncul dari tekanan eksternal pada unit-unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara,

dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2. Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam joko purnomo, 2020)

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011), efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu substansi kebijakan (substance of policy) dan konteks pelaksanaan (context of implementation). Elemen-elemen tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam substansi kebijakan, tipe manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, apakah lokasi sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah mengidentifikasi pelaksana dengan jelas, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang adekuat. Sementara itu, Wibawa (dalam Samodra Wibawadkk, 1994) menyatakan bahwa model Grindle ditentukan oleh substansi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Dasar pemikirannya adalah bahwa implementasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan tersebut ditransformasi. Keberhasilannya ditentukan oleh tingkat dapat dilakukannya kebijakan tersebut. Substansi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Tingkat perubahan yang diharapkan;
- 4) Posisi pembuat kebijakan;
- 5) Pelaksana program;
- 6) Sumber daya yang tersedia

Di sisi lain, konteks pelaksanaannya terdiri dari:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat;
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa;
- c) Kepatuhan dan responsivitas.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahaman komprehensifnya mengenai konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelaksana, penerima implementasi, dan potensi konflik yang mungkin muncul di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya pelaksanaan yang diperlukan.

Studi ini juga menerapkan pendekatan implementasi kebijakan untuk memperkuat analisis dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program Destana. Menurut George C. Edwards III, kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Merilee S. Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan serta konteks tempat pelaksanaannya, termasuk aktor yang terlibat dan kondisi lingkungan.

Konsep tata kelola bencana digunakan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara aktor dalam menangani bencana, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat. Dalam konteks program Destana, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh peran aktif masyarakat dalam kegiatan kebencanaan.

Model evaluasi yang dirancang oleh Daniel L. Stufflebeam melalui CIPP Evaluation Model digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mulai dari konteks,

input, proses, hingga hasil program.

c. Konsep Program

Menurut Arikunto dan Cepi (2014:3), terdapat dua makna dari istilah program. Pertama, secara umum, istilah ini dapat diartikan sebagai "rencana" atau "skema." Kedua, aktivitas yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang untuk masa mendatang, dan ketiga, program yang secara spesifik dilaksanakan dalam jangka pendek atau sementara. Ini dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja dan teliti untuk menilai sejauh mana pelaksanaan atau keberhasilan suatu program, agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan saat merumuskan kebijakan di masa yang akan datang yang lebih akurat.

d. Kriteria Evaluasi

Evaluasi secara sederhana adalah cara mengetahui apakah sebuah kebijakan atau program tersebut berhasil atau tidak. Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan itu berhasil atau tidak, dalam proses evaluasi diperlukan beberapa standar penilaian. Berikut merupakan kriteria evaluasi menurut (Dunn, 2003):

1) Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari kata "efektif", yang berarti tercapainya tujuan. Untuk menentukan seberapa efektif alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, digunakan istilah "efektifitas". Untuk mengetahui seberapa efektif, Anda dapat membandingkan tujuan awal dengan tujuan yang telah dicapai. Unit produk atau layanan dalam sebuah kebijakan dapat digunakan untuk mengukur efektivitas.

## 2) Efisiensi

Jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektifitas tertentu disebut efisiensi. Anggaran yang dibutuhkan selalu dikaitkan dengan tingkat efisiensi. Jika sebuah program atau kebijakan dapat beroperasi dengan efektif dengan biaya yang tidak terlalu besar, maka program atau kebijakan tersebut dianggap efisien. Rumus ekonomi mengatakan efisiensi adalah biaya sekecil-kecilnya untuk hasil maksimal.

## 3) Kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kecukupan masih berkaitan dengan efektifitas, yaitu dengan mengukur atau memprediksi seberapa baik alternatif yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam menyelesaikan masalah yang ada.

## 4) Kesamaan/Pemerataan

Kebijakan publik yang adil bagi masyarakat, terutama untuk tujuan kebijakan, disebut kesamaan atau pemerataan. Kebijakan dianggap baik apabila efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua orang. Indikator partisipasi yang adil bukan berarti semua kelompok masyarakat harus menerima perlakuan yang sama. Beberapa faktor, seperti kemampuan finansial, dapat membuat perbedaan. Sebagai contoh, komunitas yang memiliki keuangan yang kurang dapat membayar lebih sedikit.

## 5) Responsivitas

Dalam konteks kebijakan publik, responsivitas dapat didefinisikan sebagai tanggapan terhadap aktivitas. Ini berarti tanggapan sasaran kebijakan publik terhadap penerapan kebijakan. Responsivitas mengacu pada seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu di masyarakat. Untuk responsif, penilaian masyarakat selalu diperlukan untuk memberikan komentar tentang apakah pelaksanaan sudah optimal atau belum.

#### 6) Ketepatan

Ketepatan mencerminkan nilai atau harga dari sasaran program serta kekuatan asumsi yang menopang sasaran-sasaran tersebut. Kriteria yang digunakan untuk memilah sejumlah opsi menjadi rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari opsi yang disarankan tersebut merupakan pilihan sasaran yang patut dipertimbangkan. Kriteria kelayakan terkait erat dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini berkaitan dengan substansi tujuan, bukan metode atau alat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

### **1.7 Operasional Konsep**

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional merupakan penentuan konstrak atau karakteristik yang akan diteliti sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Penjelasan ini menguraikan metode spesifik yang digunakan untuk menginvestigasi dan mengoperasikan konstrak, memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang serupa atau mengembangkan teknik pengukuran konstrak yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang menghambat dan mendukung

berjalannya program destana, serta bagaimana evaluasi mengenai sarana dan prasarananya pada program destana.

**Tabel 1. 2 Operasional Konsep**

No.	Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
1.	Evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam	<p><i>Context evaluation</i> (evaluasi konteks)</p> <p><i>Input evaluation</i> (evaluasi masukan)</p> <p><i>Process evaluation</i> (evaluasi proses)</p> <p><i>Product evaluation</i> (evaluasi hasil)</p>	<p>Mengetahui tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan mengukur persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka</p> <p>1. Analisis anggaran, jumlah tenaga yang terlibat, kualitas bahan yang digunakan. Dengan mengukur analisis anggaran dibandingkan dengan rencana biaya program.</p> <p>2. Jumlah warga yang terlibat dalam musyawarah desa, jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan program. Dengan mengukur pengalaman masyarakat.</p> <p>Laporan pelaksanaan program, hasil monitoring dan evaluasi berkala. Dengan mengukur kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana.</p> <p>1. Tingkat kerusakan sarana prasarana. Dengan mengukur seberapa layak sarana dan prasarana.</p> <p>2. Perubahan indeks pembangunan manusia (IPM)</p>

## 1.8 Kerangka Pikir

**Tabel 1. 3 Kerangka Berpikir**



Ada dua jenis kerangka pikir: kerangka teori atau kerangka penalaran logis. Kedua jenis kerangka pikir memberikan penjelasan singkat tentang teori yang digunakan dan aplikasinya untuk memberikan tanggapan. Dengan menggunakan kerangka pikir ini, masalah penelitian dapat didudukkan dalam kerangka teoritis yang relevan. Kerangka pikir ini juga memiliki kemampuan untuk mengungkap, menjelaskan, dan memberikan perspektif tentang atau terkait dengan masalah penelitian.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara teratur serta mengidentifikasi sejauh mana Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menemukan berbagai komponen yang menghambat pelaksanaan program, baik dalam hal sumber daya, partisipasi masyarakat, maupun dukungan dari lembaga terkait. Selain itu, studi ini juga berusaha untuk mengevaluasi keberhasilan program dengan merujuk pada indikator-indikator dalam model evaluasi CIPP, untuk memberikan gambaran apakah program DESTANA bisa dikategorikan sebagai berhasil atau belum maksimal dalam konteks Kabupaten Wonogiri. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi strategis guna perbaikan dan penguatan program di masa mendatang.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Studi yang berjudul Evaluasi Program Sarana dan Prasarana Destana di Desa Sendang Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merujuk pada kumpulan data. Menurut Sugiyono (2015:205), tantangan yang dihadapi oleh peneliti akan selalu bersifat misterius, rumit, dan dinamis. Oleh karena itu, isu yang berkaitan dengan penelitian kualitatif ini masih merupakan masalah sementara dan saat peneliti mulai berpraktik di lapangan, isu-isu tersebut akan bisa dicarikan solusinya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui teknik statistik atau metode pengukuran kuantitatif. Dalam konteks ini, metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai perilaku dan perkataan individu yang tercatat atau diucapkan. Dengan begitu, data yang dikumpulkan bukanlah gambar (angka), melainkan kata-kata atau kalimat.

## 1.9.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

### 1. Data primer

Data primer, juga dikenal sebagai data asli atau data baru, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Wawancara dan dokumentasi adalah dua teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data- data terkait informasi mengenai bagaimana mereka melakukan evaluasi secara berkala dan mengapa sarana dan prasarana menjadi bisa masalah.

Informasi utama dalam studi ini didapatkan melalui percakapan dengan narasumber yang meliputi pihak BPBD, pemerintah desa, serta warga yang berpartisipasi dalam program Destana. Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber dengan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai narasumber.

### 2. Data sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari berbagai sumber informasi seperti literatur, jurnal, buku dan penelitian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Destana.

### 3. Teknik pengumpulan data

#### a) Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu dikenal sebagai wawancara. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai penanya, mengajukan pertanyaan, menilai

jawaban, meminta penjelasan, mencatat, dan mengeksplorasi pertanyaan lebih lanjut terkait dengan informan agar informan memberikan jawaban serta menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Informasi yang akan dianalisis adalah:

Pelaksana:

1. Kepala BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, S.STP., M.Si.
2. Sri Maryati, S.Sos, MAP, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Wonogiri

Perwakilan LSM/NGO Lokal atau Nasional, seperti:

1. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Wonogiri
2. Kelompok Relawan Destana

Mitra Sasaran:

Masyarakat yang terlibat aktif, seperti:

1. Masyarakat umum / warga desa
2. Perangkat Desa Kepala Desa, Sekretaris.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini Teknik pengumpulannya berupa foto/gambar terkait kegiatan waktu wawancara yang meliputi:

1. Profil desa;
2. Riwayat dan potensi kejadian bencana di wilayah desa;

3. Pemetaan wilayah risiko dan sumber daya lokal;
4. Data sarana dan prasarana kebencanaan, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan fasilitas darurat;
5. Struktur organisasi Destana, termasuk Forum PRB dan relawan desa;
6. Kegiatan edukasi dan pelatihan kebencanaan yang telah dilakukan;
7. Peran serta masyarakat, termasuk kelompok rentan, karang taruna, kelompok tani;
8. Rencana Kontinjensi Desa;
9. Inventarisasi Sumber Daya dan Potensi Lokal;
10. Kebijakan dan Peraturan Tingkat Desa Terkait PRB;
11. Partisipasi Lintas Sektor dan Aktor Ketiga.

### **1.9.3 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah Jalan Kabupaten Sanggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612; BPBD Kabupaten Wonogiri, Jl. Jend. Sudirman No.503, Donoharjo, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Jawa Tengah 57614; dan Desa Sendang, Jl. Raya Wonogiri, Godean, Sendang, Kecamatan Wonogiri, Jawa Tengah 57615.

### **1.9.4 Analisis Data**

Menurut Mudjiarahardjo dalam karya V. Wiratna Sujarweni, analisis data merupakan langkah-langkah mengorganisir, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau penanda, serta mengategorikan informasi untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan permasalahan atau topik yang ingin diselesaikan. Data kualitatif umumnya mudah dipahami melalui serangkaian

aktivitas tersebut. Selanjutnya, data dikumpulkan dan dianalisis.

a. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk menyingkat atau menyederhanakan suatu data yang diperoleh dan memastikan data yang diperoleh berkaitan dengan lingkup yang diteliti.

b. Penyajian data

Data yang disajikan atau dokumen yang sudah terkumpul untuk tujuan bersama disebut presentasi data. Ini dapat berupa teks, gambar, bagan, atau tabel, dan tujuan presentasi data adalah untuk menyatukan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

c. Verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah verifikasi. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan hasil penelitian mereka. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, persamaan, atau perbedaan. Seseorang dapat menarik kesimpulan dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian.